

BAB I PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai upaya dilakukan pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional, salah satu sasaran dari upaya tersebut adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemampuan guru dalam berbagai bidang terutama dalam bidang proses belajar mengajar (PBM), seorang guru harus mampu merancang dan menguasai serta memahami pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar, Rochiati, (2003: 6), menjelaskan bahwa, " Seorang guru harus mampu merancang pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar (PBM). Bagi guru yang profesional dituntut menguasai berbagai model pembelajaran".

Hal ini menunjukkan bahwa, seorang guru yang profesional harus mampu merancang dan menguasai berbagai model pembelajaran di kelas.

Upaya tersebut telah dilaksanakan antara lain dengan melaksanakan penataran-penataran oleh: Balai Penataran Guru (BPG) pada jenjang pendidikan menengah (SMU)) dan *Primary Education Quality Improvement Project* (PEQIP) serta *Basic Education Project* (BEP) pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI, SLTP/MTs).

Selain itu peningkatan kualitas guru juga dilaksanakan dengan mengadakan penyetaraan guru SMU setingkat S1 PGSM, serta dengan melaksanakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di setiap gugus

sekolah masing-masing. Semua ini dilaksanakan berorientasi kepada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam UU No, 2 Tahun 1989 disebutkan bahwa, "Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan".

Dalam mencapai tujuan itu terdapat berbagai komponen yang saling mempengaruhi diantaranya adalah kurikulum, metoda, guru, alat dan lain-lain, sebagaimana Soedomo, (1993:11), bahwa dalam interaksi belajar mengajar ada beberapa komponen yang harus dipenuhi, yaitu: (1). Tujuan interaksi yang diharapkan, (2). Bahan (pesan) yang akan disampaikan kepada siswa, (3). Pendidikan dan siswa, (4) Alat/sarana yang digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan, (5) Metode yang digunakan untuk mencapai bahan (materi), (5) Situasi lingkungan untuk menyampaikan agar tercapainya tujuan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan umum bertujuan untuk membentuk prilaku dan kepribadian individu sesuai dengan prinsip dan konsep moral dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan sebagai landasan pencapaian tujuan pendidikan umum, prinsip-prinsip ini didasarkan kepada keyakinan dan perbuatan.

Manusia sebagai guru atau sebagai siswa diciptakan oleh Tuhan untuk mengenal kerjasama, hal ini sesuai dengan firmanNya (Q.S Al Hujarat; 13): "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal".

Atas dasar itulah manusia disebut makhluk sosial, yang berarti walaupun manusia merupakan satuan yang berdiri sendiri yang memiliki kemampuan dan kebutuhan yang sendiri pula, namun dalam usaha memenuhi kebutuhan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya itu tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri tanpa pertolongan orang lain. Dengan kata lain manusia selalu membutuhkan pertolongan orang lain, ketergantungan individu terhadap individu lainnya sangat diperlukan, bahkan cara ini telah diperlukan sejak kita lahir sampai meninggal dunia, hal inilah yang disebut dengan interaksi sosial.

Hal di atas tidak juga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, namun juga diperlukan dalam dunia pendidikan, seperti halnya dengan belajar berkelompok yang dilakukan oleh siswa baik di rumah maupun di sekolah. Bila hal ini dilakukan oleh siswa dalam memecahkan masalah dalam bidang studi di sekolah, maka disebutlah dengan nama belajar berkelompok atau belajar secara bergotong royong atau belajar bersama untuk memecahkan masalah dan mengambil keuntungan bersama yang disebut pembejarian *cooperative learning*.

Semua model mengajar ditandai dengan struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan (reward) struktur tugas mengacu kepada

dua hal yaitu pada cara pembelajaran itu diorganisasikan dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Hal ini mengacu kepada pembelajaran klasikal maupun dengan pembelajaran kelompok kecil, siswa diharapkan melakukan apa saja selama pengajaran itu, baik tuntutan akademik dan sosial terhadap siswa pada saat mereka bekerja menyelesaikan tugas-tugas belajar yang diberikan kepada mereka. Struktur tugas berbeda sesuai dengan berbagai macam kegiatan yang terlibat di dalam pendekatan pengajaran tertentu.

"Struktur tujuan suatu pelajaran adalah jumlah saling ketergantungan yang dibutuhkan siswa pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. dalam hal ini terdapat tiga macam struktur tujuan yang telah berhasil diidentifikasi: 1). Struktur tujuan disebut individualistik jika pencapaian tujuan itu tidak memerlukan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada baik buruknya pencapaian orang lain, siswa yakin upaya mereka sendiri untuk mencapai tujuan tidak ada hubungannya dengan upaya siswa lain. 2). Struktur tujuan kompetitif terjadi bila seorang siswa dapat mencapai suatu tujuan jika dan hanya jika siswa lain tidak mencapai tujuan tersebut, dengan arti setiap usaha yang dilakukan oleh suatu individu untuk mencapai tujuan merupakan persaingan bagi individu lainnya, 3). Struktur tujuan kooperatif terjadi jika siswa dapat mencapai tujuan mereka hanya jika siswa lain dengan siapa mereka bekerja sama mencapai tujuan tersebut". (Ibrahim, M. 2000: 2 – 3)

Dalam dunia pendidikan kita mengenal model kurikulum yang mengandung berbagai model pengajaran, pada suatu pembelajaran siswa diharapkan dapat memecahkan masalah, kerja sama antara individu dalam kelompok. Kerja sama ini juga terjadi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru, tidak saja menjalin kerja sama antara individu dalam kelompok dan antar kelompok yang ada di sekolah, namun kerja sama antar siswa dengan gurupun sangat dibutuhkan.

Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendorong perubahan isi kurikulum yang telah berlaku sebelumnya, yaitu kurikulum 1984. dalam UU No 2 tahun 1989 pasal 39 ayat 2 dinyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis dan jenjang pendidikan wajib memuat: a) Pendidikan Pancasila, b) Pendidikan Agama, dan pendidikan Kewarganegaraan. Penjelasan pasal di atas dinyatakan bahwa, sebutan-sebutan tersebut bukan nama mata pelajaran, melainkan sebutan yang mengacu pada pembentukan kepribadian dan pembentukan unsur-unsur kemampuan yang diajarkan dan dikembangkan melalui pendidikan. Lebih dari satu unsur dapat digabung dalam satu mata pelajaran atau sebaliknya satu unsur dapat dibagi menjadi lebih dari satu mata pelajaran. Kurikulum tahun 1994 mengorganisasi pendidikan Pancasila dan pendidikan Kewarganegaraan dalam satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan yang biasa disingkat dengan PPKn.

Dalam landasan, program dan pengembangan kurikulum SMU dinyatakan bahwa, mata pelajaran PPKn diarahkan pada ranah moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari berdasarkan nilai moral Pancasila, nilai luhur yang berakar pada budaya bangsa Indonesia dan nilai moral agama, selain itu mata pelajaran ini dimaksudkan pula untuk membina pengetahuan dan kemampuan yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara dan pendidikan pendahuluan bela negara (Depdikbud 1993: 15).

Pendidikan moral dalam sistem pendidikan mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan pokok pendidikan yang lain. Tidaklah salah bila suatu pendapat mengatakan bahwa,

"Pendidikan moral bagi suatu negara beradab mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena tingginya tingkat pengetahuan dan teknologi yang dicapai melalui proses pendidikan tidak akan ada artinya kemaslahatan umat tanpa dibarengi dengan tingkat moralitas yang tinggi" (Soenarjati dan Cholisin, 1987: 15).

Makanya pendidikan moral juga harus diperhatikan secara selaras dengan pendidikan segi intelektual ataupun segi ketrampilan.

Terlihat di kalangan siswa banyak nilai-nilai moral yang dilanggar ataupun diabaikan, perbuatan tersebut dapat digolongkan kenakalan remaja. Maraknya kenakalan remaja dan perkelahian antar pelajar di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Semarang, dan sebagainya, banyak kalangan yang menilai bahwa, pendidikan moral melalui pendidikan formal belum dapat mencapai sasaran yang diharapkan (Kompas, 29 April 1996, dalam Sukisno, 1998). PPKn sebagai pendidikan moral harus menjadi jembatan dalam mencari solusi yang serius terhadap masalah tersebut.

Guru sebagai pengelola aktivitas pembelajaran dapat memahami betul bahwa sasaran PPKn meliputi aspek pengetahuan (knowledge), sikap (skill) atau nilai moral dan segi perilaku. Guru berupaya agar pembelajaran PPKn mampu mengangkat kepermukaan ketiga aspek tersebut secara berimbang dan berkesinambungan di dalam dunia pendidikan, namun guru menyadari bahwa tidaklah semudah itu untuk dapat mencapai sasaran tersebut. Pembelajaran PPKn yang selama ini

dilaksanakan dengan mengandalkan tutorial (ceramah) yang menekankan pada penyampaian informasi. Hal ini dipandang sangat mudah dilaksanakan dari cara yang lain, sebab guru telah terbiasa dengan menggunakan model pembelajaran tersebut. Sadar atau tidak bahwa, model pembelajaran tersebut hanya mampu mengembangkan aspek pengetahuan (knowledge) saja. Fenomena yang dihadapi adalah guru belum menemukan suatu model pembelajaran yang efektif untuk diterapkan pada mata pelajaran PPKn bagi siswa sekolah di Sekolah Menengah Umum.

“Ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran dan kebaikan model sangat tergantung kepada tujuan pengajaran itu sendiri” (Dahlan, D. 1990: 21), Selanjutnya untuk mengembangkan ranah moral, berdasarkan penelitian Soenarjati dan Cholisin, (1987: 30). berpendapat bahwa,

“ Pendidikan moral tidak akan memberi hasil yang baik apabila dilaksanakan dengan cara-cara tradisional seperti memberi nasehat, petuah-petuah, contoh, hukuman dan hadiah Pendidikan moral harus mampu menumbuhkan kesadaran moral yang merupakan unsur penting dalam mengendalikan diri bagi seseorang”.

Prinsip pembinaan moral yang perlu diperhatikan menurut ketentuan Dirjen Dikti, Depdikbud, yaitu “melalui keterpanggilan-keterlibatan-keterundangan dan keterikatan (engagement) siswa sendiri dengan konsep moral yang kita tampilkan” (Depdikbud, 1982: 14-15). Melalui cara ini tidak secara langsung kita ajari. Melainkan diundang untuk cara menangkap sendiri misi tersebut. Menurut Superka, D. ada delapan



macam pendekatan pembinaan moral, yaitu pendekatan (1) *Avokasi* (2) *Inclucation* atau *sigestif* dan pengulangan, (3) *Awarences* (kesadaran), (4) *Moral Reasoning* (pelajaran moral) (5) *Analisis*, (6) *Clarification*, (7) *Comitment* (kesepakatan), (8) Pendekatan union (Toyib, R. 1987: 12-14). Pendekatan lain yang dapat digunakan dalam pendekatan moral adalah pendekatan Humanistik, yaitu pendeketan yang memandang siswa sebagai memiliki potensi untuk berkembang dan melakukan pilihan serta memiliki keinginan-keinginan tertentu., sebagaimana Syaodih, N.S. (2000: 87), menjelaskan bahwa, "untuk meningkatkan pribadi yang utuh bukan hanya segi fisik dan intelektual tetapi juga segi sosial dan afektif (emosi, sikap, perasaan, nilai dan lain-lain)".

Hal ini dapat memberi makna bagi kita bahwa, guru dalam model kurikulum ini berperan sebagai mengoftimalkan perkembangan anak melalui pengaktualisasian segala potensi yang dimilikinya, agar menjadi pribadi yang berkembang secara penuh sehingga menjadi manusia yang utuh. Kurikulum ini menekankan keikutsertaan murid dalam belajar, yaitu dengan kegiatan belajar bersama, siswa dapat mengadakan penrundingan, persetujuan, pertukaran pendapat atau tukar pemandangan, mempertanggungjawabkan bersama hasil kerjanya dan menanggung akibat bersama. Melalaui partisipasi dalam berbagai kegiatan kelompok terjadi interaksi, interpenetrasi dan integrasi dari pemikiran, perasaan dan tindakan.

Kemudian dalam evaluasi kurikulum rekonstruksi sosial lebih mengutamakan proses dari pada hasil, maka pembelajaran yang efektif

untuk mata pelajaran PPKn adalah pelajaran yang mampu menumbuhkembangkan kesadaran moral yang diharapkan dapat terwujud dalam bentuk perilaku sehari-hari berdasarkan moral nilai Pancasila, nilai luhur yang berurat berakar pada sosio kultural bangsa kita. Selain itu mata pelajaran ini dimaksudkan untuk membina pengetahuan dan kemampuan yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara dan pendidikan pendahuluan bela negara. Kegiatan pembelajaran yang harus dikembangkan dalam mata pelajaran ini adalah melalui berbagai bentuk partisipasi secara individual dalam kelompok. Kegiatan pembelajaran lebih mengutamakan proses dari pada hasil. Model pembelajaran dipandang mampu memenuhi tuntutan secara individual dan kelompok tersebut adalah suatu model pembelajaran.

Model pembelajaran *cooperative learning* adalah suatu proses belajar yang membutuhkan partisipasi dan kerja sama dalam kelompok. Suatu model pembelajaran memungkinkan siswa untuk belajar konten akademik dan keterampilan-keterampilan dalam bidang sosial dan beberapa perilaku sosial, sikap dan kemampuan (Stahl, 1994: 3). Penggunaan model pembelajaran *cooperative learning* di kelas tentu mempunyai dampak bagi individual diharapkan mampu mencapai sasaran mata pelajaran PPKn yang diharapkan.

Namun bila ditinjau pembelajaran *cooperative learning* juga akan mempunyai kelebihan dan kelemahan, kelebihanannya adalah bahwa, dalam pembelajaran ini masalah dapat diselesaikan bersama, keuntungan dapat dipetik bersama, tanggung jawab bersama dan bekerja secara



gotong royong. Kelemahannya adalah kekuatiran bahwa, akan terjadi kekacauan dan keributan di kelas dan siswa tidak belajar jika mereka ditempatkan dalam group. Juga banyak orang mempunyai kesan negatif mengenai kegiatan kerja sama atau belajar dalam kelompok. Banyak juga siswa tidak senang disuruh bekerja sama dengan yang lain. Siswa yang tekun merasa bekerja melebihi siswa yang lainnya dalam grup mereka, sedangkan siswa yang kurang mampu merasa minder ditempatkan dalam satu grup dengan siswa yang lebih pandai. Siswa yang tekun juga merasa temannya yang kurang mampu hanya nurut saja pada hasil jerih payah mereka. Kesan negatif mengenai kegiatan bekerja/belajar dalam kelompok ini juga bisa timbul karena ada perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau keunikan pribadi mereka karena harus menyesuaikan diri dengan kelompok, (Lie, 2002: 27-28).

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah.

Dari gambaran latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tergambar peranan pembelajaran terhadap mata pelajaran PPKn. Kurikulum akan lebih berarti bagi siswa untuk mengubah sikapnya melalui proses belajar mengajar. Tujuan kurikulum atau tujuan bidang studi menggambarkan bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap berhubungan dengan bidang studi dalam kurikulum sekolah. Setiap bidang studi mempunyai tujuan masing-masing yang saling berbeda satu studi menggambarkan bentuk pengetahuan, ketrampilan dan sikap berhubungan dengan bidang studi dalam kurikulum sekolah. Setiap

sama lainnya begitu juga tentunya bidang studi PPKn. Tujuan masing-masing ini menjadi acuan bentuk pengalaman belajar yang dicapai siswa setelah mempelajari bidang studi tersebut, seperti halnya setelah siswa mempelajari nilai-nilai di dalam mata pelajaran PPKn, maka akan tercermin pada sikap anak nilai-nilai yang ada dalam pelajaran PPKn tersebut.

Penguasaan pengetahuan, pengembangan nilai dan pengamalan nilai moral dalam perilaku merupakan unsur utama yang harus dicapai secara menyeluruh dalam mata pelajaran PPKn. Model pembelajaran yang dipandang mampu mencapai sasaran tersebut adalah model pembelajaran *cooperative learning*. Melalui model pembelajaran *cooperative learning* siswa dapat memperoleh pengetahuan, kecakapan-kecakapan, nilai sebagai pertimbangan untuk berpikir dan menentukan serta berbuat, dan berpartisipasi sosial, (Stahl, et al, 1994: 4-8).

Model pembelajaran *cooperative learning* telah lama dikenal guru, sejak dahulu namun belum biasa dilaksanakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Pelaksanaan model pembelajaran *cooperative learning* sangat tepat untuk mata pelajaran PPKn karena dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

1. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian.

Sehubungan dengan isu-isu yang telah dikemukakan dalam uraian yang lalu pada, masalah pokok yang akan dikaji melalui penelitian ini adalah **"Apakah model pembelajaran *cooperative learning* dapat**

diterapkan dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PPKn ?”

Berdasarkan masalah yang dikemukakan maka yang menjadi rincian pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah selanjutnya diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi belajar di sekolah yang mendukung penerapan model pembelajaran *cooperative learning* (guru, siswa, fasilitas dan lingkungan) ?
 - a. Apakah guru mengetahui tentang model *cooperative learning* ?
 - b. Apakah guru memiliki ketrampilan tentang *cooperative learning* ?
 - c. Apakah guru mampu mengembangkan pembelajaran *cooperative learning*?
2. Model pembelajaran *cooperative learning* apa yang cocok untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn?.
 - a. Model desain pembelajaran *cooperative learning* apa yang cocok untuk mata pelajaran pelajaran PPKn?
 - b. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran *cooperative learning* untuk mata pelajaran PPKn ?
 - c. Bagaimana penilaian dalam pembelajaran *cooperative learning* untuk mata pelajaran PPKn?
3. Apakah hasil pembelajaran model *cooperative learning* efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn?

2. Pembatasan Masalah.

Tujuan pengajaran adalah memecahkan masalah (*problem Solving*) bersama sesama siswa, sekaligus siswa bekerja sama dalam tanggung jawab, guru dan siswa belajar bersama, proses pengajarannya kerjasama dalam kelompok, penilai proses dan hasil kerja juga secara berkelompok.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, proses pengajaran adalah yang disebut dengan model mengajar agar tidak terjadi kesimpang siuran kepada pihak pembaca dan tidak mengundang kebingungan, penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian tentang .

1. Model Pengembangan Pembelajaran *cooperative learning* untuk Mata pelajaran PPKn ”.
2. Pelaksanaan PPKn dibatasi pada kelas III SMU Semester 1 sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia berdasarkan kurikulum 1994.
3. Hasil belajar siswa dibatasi pada hasil belajar siswa yang mengikuti suatu model pembelajaran untuk mata pelajaran PPKn selama pelaksanaan pengembangan model.

C. Definisi Operasional.

Jika penelitian itu terdiri dari serangkaian aktivitas operasional, maka penting sekali memberdayakan variabelnya lebih operasional pula, variabel yang mengoperasionalkan variabel berarti mengungkapkannya dalam bentuk yang dapat diobservasi dan diukur atau dapat diobservasi dan diamati (tidak kabur), dapat diukur dan mampu juga dapat diuji. (Tuckman, 11978: 13)

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini , yaitu satu variabel bebas (*independent*), yang dimaksud variabel *independent* dalam penelitian ini adalah model pembelajaran *cooperative learning*, dan yang lainnya variabel terikat (*dependent*), adapun variabel terikat disini adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn sebagaimana Tuckman, (1978: 58), menjelaskan bahwa, "The independent varibel, which is a stimulus variable or input, operates either within a person or within his environment to effect his behaviour".

Kutipan di atas dapat dimaknai bahwa, variabel bebas sebagai variabel stimulus atau input dalam penelitian ini adalah model pembelajaran *cooperative learning*, sedangkan varibel terikatnya yaitu out put, sebagaimana Tuckman, (1978: 59), menyatakan bahwa,

"The dependent variable is that factor which is observed and measured to determine the effect of the independent variable, that factor that appears, disappears, or varies as the exprimenter introduces, removes, or varies the independent variable".

Kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa, sebagai variabel *out put* adalah hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PPKn. Maka berikut akan dikemukakan definisi operasional masing-masing variabel tersebut, adapun defenisi operasional yang dimaksud di sini untuk menghindari perbedaan pendapat yang mungkin terjadi, sebagaimana pendapat Tuckman, (1978: 13), menjelaskan bahwa, " Operationalizing variables means stating them in an measurable form, making them available for manipulation, control, and examination".

Dengan demikian maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini kiranya perlu dibuat definisi operasionalnya, yaitu;

1. Model Pembelajaran Kooperatif.

Model pembelajaran sebenarnya mengandung dua maksud, yaitu, model mengajar oleh guru dan model belajar oleh siswa. suatu model mengajar dapat diartikan sebagai suatu rencana yang digunakan dalam menyusun kurikulum dan menentukan materi pelajaran sesuai apa yang dikatakan Dahlan, (1990: 21), menjelaskan bahwa, " suatu model mengajar dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pengajaran dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam *setting* pengajaran ataupun *setting* lainnya".

Hal di atas dapat diambil maknanya yaitu bahwa, kegiatan ini lebih menekankan pada aktivitas guru dalam melaksanakan pengajaran.

Selanjutnya penekanan yang seimbang antara model mengajar dan model belajar dikemukakan oleh Joice, (2001: 2), menjelaskan bahwa,

" ... is also designed to help the students increase their power as learner. Thus, as student master information and skills, the result of each learning experience is not only the content they learn, but the greater ability the acquire to approach future learning task".

Kutipan di atas dapat dimaknai bahwa, model pemebelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan porsedur

pengorganisasian pengalaman belajar secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar.

Selanjutnya dikatakan Hasan. (1996: 250), bahwa, "Gotong royong sebagai suatu nilai memiliki atribut, kekompakan kerja, tujuan yang sama, tanggung jawab bersama, dan semangat kebersamaan".

Pendapat Hasan di atas diartikan bahwa, koopertif itu adalah belajar bersama, keuntungan bersama, tanggung jawab bersama antara siswa dalam kelompok yang telah diatur oleh guru.

Kooperatif sebagai suatu pembelajaran menurut Stahl, (1994: 10-15), menjelaskan bahwa kooperatif memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- a. seperangkat tujuan khusus hasil belajar siswa;
- b. tujuan hasil belajar yang diterima siswa ;
- c. ketergantungan yang bersifat positif;
- d. interaksi *face to face*;
- e. pertanggungjawaban secara individu;
- f. pengakuan pada keberhasilan;
- g. kelompok-kelompok yang heterogen;
- h. perilaku dan sikap positif dalam interaksi sosial;
- i. proses kelompok menghasilkan pemikiran kelompok.

Dari uraian di atas, maka pembelajaran kooperatif dapat dikatakan sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan kekompakan kerja, tujuan yang sama, tanggung jawab bersama, rasa

kebersamaan dalam prosedur pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu juga berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam kelas.

2. Hasil Belajar siswa dalam mata pelajaran PPKn.

Mata pelajaran PPKn adalah sebuah mata pelajaran yang diarahkan pada ranah moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila, nilai luhur yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Selain itu mata pelajaran PPKn dimaksudkan untuk membina pengetahuan dan kemampuan yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara dan pendidikan pendahuluan bela negara. Ada tiga unsur yang dikembangkan dalam PPKn, diantaranya: unsur afektif, perilaku, dan pengetahuan. Maka evaluasi hasil belajar dalam mata pelajaran PPKn juga meliputi tiga unsur tersebut.

Evaluasi hasil belajar siswa pada model pembelajaran *cooperative learning* lebih menekankan evaluasi proses. (David, W. 1994: 89) Evaluasi belajar ini dilakukan oleh guru maupun siswa itu sendiri. Guru melaksanakan evaluasi tersebut yaitu selama aktivitas belajar mengajar berlangsung dan pada waktu presentasi kelompok serta hasil kerja siswa dalam kelompok. Evaluasi oleh siswa adalah merupakan penilaian tanggungjawab siswa terhadap kelompok mereka masing-masing. Adapun bentuk evaluasi tersebut unturnya sebagai berikut:

1). Unsur-unsur penilaian oleh guru yang meliputi:

- a. Pelaksanaan syarat dan ketentuan pengajaran.
 - b. Kerjasama sebagai kelompok
 - c. Partisipasi aktif di kelas
 - d. Pengetahuan tentang topik
 - e. Kejelasan apa yang dipelajari dari topik
 - f. Kesesuaian dengan yang diinginkan dipelajari
 - g. Pemahaman siswa
 - h. Kejelasan dan urgensi jawaban
 - i. Pengorganisasian jawaban
 - j. Pencapaian tujuan pengajaran
- 2). unsur-unsur penilaian oleh diri siswa.
- a. pemahaman terhadap topik
 - b. kerja sama dalam kelompok
 - c. partisipasi dalam kelompok
 - d. tanggung jawab dalam kelompok
 - e. penilaian terhadap anggota yang lain

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, evaluasi belajar siswa dalam pembelajaran kooperatif ini adalah ingin mengetahui sikap dan perilaku siswa dalam berkoperatif serta pengetahuan siswa tentang topik yang dipelajari.

3. *Pengetahuan*

Suatu yang diperoleh melalui pengalaman-pengalan kemudian diserap melalui Panca Indra. Sedangkan pengetahuan yang dimaksud pada penelitian ini adalah pengetahuan guru dalam mengembangkan

model *cooperative learning* di kelas berdasarkan pengalaman yang dimilikinya yang telah diserap melalui indranya tentang pembelajaran tersebut.

Definisi operasional pengetahuan guru dalam mengembangkan pembelajaran *cooperative learning* adalah skor total yang diperoleh dari jawaban responden mengenai kapasitas guru secara intelektual atau fisik untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dengan indikator: pengetahuan guru menyusun program pengembangan model, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil pembelajaran *cooperative learning*.

4. Keterampilan .

Suatu tugas atau aktivitas fisik yang menuntut ketepatan, kecermatan dan kecepatan dalam pelaksanaannya. (Angga, A. 1991: 30).

Sedangkan ketrampilan yang dimaksud pada penelitian ini adalah ketrampilan guru tentang model *cooperative learning* yang menuntut ketepatan kecepatan dalam pelaksanaannya.

Definisi operasional tentang ketrampilan guru dalam mengembangkan model adalah pada hakekatnya adalah skor total yang diperoleh dari jawaban responden mengenai keterampilan guru tentang mengembangkan, merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran *cooperative learning*.

5. Kemampuan.

Adalah kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan (Robin . 1996: 126).

Sedangkan kemampuan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kemampuan guru dalam mengembangkan model *cooperative learning* di kelas.

Definisi operasional kemampuan guru dalam mengembangkan model pembelajaran adalah skor total yang diperoleh dari jawaban responden mengenai kapasitas guru baik secara intelektual atau fisik untuk merencanakan serta menyusun strategi pelaksanaan pembelajaran dengan indikator: Kemampuan dalam merumuskan model pembelajaran, pengembangan model pembelajaran, perencanaan model, pelaksanaan model serta pengevaluasian model pembelajaran *cooperative learning*.

D. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah dapat mengimplementasikan suatu model pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMU Negeri Pekanbaru Riau meliputi:

1. Untuk menemukan suatu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui pembelajaran PPKn di SMU.
2. Untuk mengetahui efektifitas model yang digunakan tersebut dalam mata pelajaran PPKn di SMU.



E. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk mengembangkan model pembelajaran *cooperative learning* kajian dalam upaya mendalami kurikulum khususnya suatu pembelajaran. Selanjutnya penelitian ini akan menjadi bukti baru bahwa pengembangan suatu model pembelajaran *cooperative learning* pada mata pelajaran PPKn di SMU negeri atau di SLTP. Juga diharapkan pula akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pembelajaran *cooperative learning* juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMU Negeri atau di sekolah lainnya.

2. Manfaat Praktis.

Memberi pengalaman kepada guru yang bersangkutan untuk dapat memahami suatu model pembelajaran dalam proses belajar mengajar, dan bagi siswa dapat diterapkan dalam kelompoknya dengan menggunakan model dalam pembelajaran.

Juga bagi guru mata pelajaran PPKn lainnya yang ada di Pekanbaru, melalui MGMP, sebagai bahan masukan atau *feed back* bagi penyempurnaan dan peningkatan kurikulum dan memperluas pengetahuan serta wawasan tentang model-model kurikulum dan pembelajaran dalam mengajar PPKn.